



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA SILO BARU MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN DESA PESISIR TANGGUH (PDPT)

Nixson Rauven Sitompul

PNS Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan
e-mail: nixonrauvensitompul@gmail.com

Abstrak

Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) adalah bentuk kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan yang ada di desa-desa pesisir yang dianggap masih rentan terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan. Desa Silo Baru merupakan salah satu desa dari tiga desa pesisir di Kabupaten Asahan yang mendapat sentuhan program PDPT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program PDPT dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Silo Baru. Sehingga, penulis memfokuskan pada pengembangan masyarakat nelayan menurut Apridar. *et. all* (2011:157) yang ditinjau dari: aspek pembangunan daerah pesisirnya, pengelolaan dan perbaikan ekosistem daerah pesisir dan pemberdayaan masyarakat nelayan melalui penguatan pengorganisasian nelayan dan pengembangan solidaritas nelayan dalam menciptakan kemandirian masyarakat nelayan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program PDPT di Desa Silo Baru masih belum optimal dan kurang mengedepankan pemberdayaan masyarakat nelayan sehingga program ini membutuhkan beberapa perbaikan dalam pelaksanaannya dilapangan.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, program, Desa Silo Baru.

*Fishermen Community Empowerment at Silo Baru Village Through Integrated
Coastal Village Management Program (PDPT)*

Abstract

PDPT program is intended to empower the fishermen community in coastal villages vulnerable to natural disaster and environmental degradation. Silo Baru village is one among three coastal villages in Asahan District assisted by PDPT program. This research aimed to analyze the PDPT program in empowering fishermen community at Silo Baru village. The researcher focused on the aspects of coastal community development cited from apridar. et. all (2011: 157) comprising: coastal area coastal community empowerment by strengthening fishermen institutions and solidarity to create fishermen community's resilience. This research employed a qualitative method with a case study, the data were collected through in- depth interviews, observation and documentary reviews. The research result showed that the PDPT program had been conducted for four years, the program did not run optimally and did not address appropriate coastal empowerment activities until the PDPT program need some correction for real implementation.

Keywords: Community Empowerment program, Silo Baru Village.

A. LATAR BELAKANG

Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia mencapai 7,87 jiwa atau sebesar 25,14% dari total jumlah penduduk miskin nasional yang mencapai 31.02 jiwa (BPS 2013). Dengan tingginya ketidakberdayaan masyarakat di wilayah pesisir akan menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih tinggi, sehingga beban yang di keluarkan pemerintah untuk menanggung

kebutuhan masyarakat akan ikut bertambah. Ketidakberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan atau masyarakat nelayan merupakan masalah pokok nasional yang penangulangannya harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kemandirian sosial.

Pada era otonomi saat ini dengan berlakunya UU 32 Tahun 2004 yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah juga mewajibkan untuk mengimplementasikan peran serta masyarakat melalui program-



program pemberdayaan dalam rangka strategi pembangunan daerah, namun diantara program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah sering melupakan pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang sering terlupakan terlihat dengan tidak adanya perencanaan dari setiap program pemerintah untuk memberikan program-program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan oleh masyarakat pesisir, program pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kultur dari budaya pesisir tersebut tentang keperluan apa yang mereka butuhkan untuk mencari nafkah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia, salah satunya yaitu Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Kegiatan Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dimana tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di desa pesisir dan pulau-pulau kecil, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup di desa pesisir dan pulau-pulau kecil, Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif di desa pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan/atau Pengelolaan sarana dan/atau prasarana sosial ekonomi di desa pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kabupaten Asahan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang tiga desa pesisirnya terpilih untuk mendapat sentuhan program PDPT oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP). Dimana pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.136/3240.K Tanggal 16 Desember Tahun 2004 dalam hal penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan menjadi salah satu kabupaten yang mendapat isu-isu negatif mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil identifikasi isu pengelolaan wilayah pesisir dan hasil

konsultasi publik yang telah dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi, maka diperoleh sepuluh isu yang menjadi prioritas di kawasan pesisir Kabupaten Asahan, yaitu Kerusakan Hutan Mangrove, Kerusakan Terumbu Karang dan Padang Lamun, Pencemaran Wilayah Pesisir oleh Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga, Ancaman Intrusi Air Laut ke Daerah Pertanian dan Pemukiman, Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia, Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Rendahnya Ketaatan dan Penegakan Hukum, Belum Adanya Penataan Ruang Wilayah Pesisir, Belum Optimalnya Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya, dan Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi dan Objek Wisata Bahari. Salah satu desa pesisir yang mendapat sentuhan program PDPT di Kabupaten Asahan adalah Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat pesisir di desa tersebut dapat meningkat, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan.

Kelemahan-kelemahan dalam proses pelaksanaan program PDPT ini dapat terlihat pada SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 188.4/1064/IV/2013 s/d 188.4/1090/IV/2013 Tanggal 11 Juni Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013, dari tiga desa pesisir yang mendapat sentuhan program PDPT hanya Desa Silo Baru yang jumlah penetapan KMP nya paling sedikit yaitu di Desa Silo Baru hanya didirikan enam KMP sedangkan dua desa lainnya yaitu Desa P. Sei Baru dan Desa Asahan Mati dimana kedua desa ini berlokasi pada kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Tanjung Balai didirikan masing-masing sepuluh KMP padahal besar alokasi anggaran yang di berikan serupa masing-masing desa mendapatkan Rp.267.856.000. Dengan sedikitnya jumlah KMP yang didirikan maka akan sedikit pula keterwakilan dari keseluruhan masyarakat nelayan di Desa Silo Baru yang akan diberdayakan, padahal setiap KMP hanya memiliki anggota kelompok nelayan sebanyak 10 sepuluh orang. Sedangkan jumlah dari keseluruhan nelayan di Desa Silo Baru sebanyak 333 orang.

Kelemahan lain yang menjadi permasalahan, juga terlihat pada pelaksanaan



pemberdayaannya dimana jumlah anggaran yang tersedia akan dialokasikan sesuai dengan bentuklima kegiatan bina yang telah di tetapkan oleh KPP. Akan tetapi pada pelaksanaan KMP pada Desa Silo Baru kegiatan yang dijalankan hanya dalam bentuk dua kegiatan bina saja yaitu pada Kegiatan Bina Bumber Daya yang berupa penanaman bibit mangrove dan Kegiatan Bina Lingkungan dan Infrastruktur yang berupa pembuatan tanggul, hal ini terlihat dalam laporan Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan yang di rinci pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Alokasi Anggaran Kegiatan PDPT Desa Silo Baru

Nama Kampung	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
KMP KARANG JAYA	MANGROVE	Rp. 27.856.000
KMP BEROHOL JAYA	PEMB. TANGGUL	Rp. 48.000.000
KMP BINTANG NELAYAN	PEMB. TANGGUL	Rp. 48.000.000
KMP SEMANGAT	PEMB. TANGGUL	Rp. 48.000.000
KMP BERSATU	PEMB. TANGGUL	Rp. 48.000.000
KMP BAHAGIA	PEMB. TANGGUL	Rp. 48.000.000

Sumber: Laporan Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan

Jika kita melihat tabel 1 diatas maka kegiatan PDPT yang dilaksanakan hanya sebatas dua bina kegiatan saja yang menjalankan sehingga tiga bina kegiatan yang direncanakan oleh KPP di Desa Silo Baru tidak berjalan. Sehingga unsur kegiatan bina lain dalam tujuannya untuk membangun dan memberdayakan masyarakat nelayan akan sangat berkurang. Padahal didalam Peraturan Dirjen KP3K mengenai pedoman teknis dalam pelaksanaan program PDPT dinyatakan setiap kegiatan PDPT yang dilaksanakan di desa pesisir harus dilaksanakan pada lima kegiatan bina yang menjadi standart prosedur pelaksanaan PDPT.

Program PDPT juga mengalami kendala pada tahapan pelaksanaan pemberdayaanya,

seperti jarak dari Desa Silo Baru yang terpencil berjarak 25 km dari Kota Kisaran (Ibukota Kabupaten Asahan) dirasa sangat jauh untuk pelaksanaan kegiatan PDPT. Hal ini menjadi penghambat dikarenakan tenaga-tenaga teknis yang bertindak sebagai fasilitator dan pengiriman bantuan berada di Kota Kisaran. Dengan jauhnya jarak yang ditempuh ke Desa Silo Baru yang akan sangat memakan banyak waktu, akan berbentrokan dengan jadwal melautnya masyarakat nelayan Desa Silo Baru. Dengan jauhnya jarak waktu ke Desa Silo Baru oleh para tenaga-tenaga teknis akan menelan biaya administrasi. Hal ini dapat terlihat dari DIPA No.032.07.4.071050/20 program PDPT Tanggal 5 Desember Tahun 2012 dimana dari total dana yang sebesar Rp.1.093.163.000,00 untuk biaya administrasi saja mencapai Rp.245.575.000,00, sehingga dana yang ada untuk kegiatan setiap bina pada Program PDPT akan banyak terpotong biaya administrasi.

Dari pemaparan diatas maka fenomena-fenomena yang dikaji penulis pada latar belakang permasalahan ini adalah:

1. Adanya ketidaksesuaian perencanaan program PDPT dalam prosesnya memberdayakan masyarakat pesisir dengan hanya ditetapkannya enam Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) (SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 188.4/1064/IV/2013 s/d 188.4/1090/IV/2013 Tanggal 11 Juni 2013 Tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) di Desa Silo Baru lebih sedikit dari dua desa pesisir lainnya yang mendapatkan sentuhan program PDPT. Dimana dengan hanya enam KMP yang terdiri dari 60 anggota masyarakat nelayan di Desa Silo Baru, belum dapat memberdayakan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang berjumlah sebesar 333 orang yang ada di Desa Silo Baru.
2. Adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan program PDPT di Desa Silo Baru yang hanya melaksanakan dua kegiatan bina saja, sedangkan konsep dari Program PDPT yang di konsep oleh KPP kegiatan bina harus dilaksanakan dalam bentuk lima kegiatan bina dalam menuntaskan permasalahan masyarakat nelayan. (Laporan Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan).



3. Sangat besarnya biaya administrasi yang mencapai Rp.245.575.000,00, yang diambil dari total dana program PDPT dan hal ini diindikasikan pengurangan kegiatan bina pada Desa Silo Baru. (DIPA No.032.07.4.071050/20 program PDPT Tanggal 5 Desember 2012)
4. Fenomena selanjutnya dikutip dari KPKpos Tanggal 13 Januari 2014 yang memberitakan adanya keluhan dari salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan di akibatkan akses menuju Desa Silo Baru yang rusak parah menjadi penghambat pembangunan atau optimalnya program PDPT di desa itu. (KPKpos.com).

Berdasarkan beberapa fenomena permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan tentang pelaksanaan program PDPT di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka fokus pada penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program PDPT dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikaji penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana struktur program PDPT dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan melalui di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan

3. Manfaat Penelitian

- a. Aspek Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana melaksanakan program-program pembangunan di daerah dalam semangatnya memberdayaan masyarakat nelayan di desa-desa pesisir yang mengalami ketertinggalan pembangunan.
- b. Aspek Praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan khususnya desa-desa pesisir seperti Desa Silo Baru mengenai apa yang perlu dilakukan dalam melaksanakan

program PDPT agar dapat menciptakan peningkatan kemampuan masyarakat nelayan dalam kegiatan pemberdayaan pada bina yang dilaksanakan kedepannya.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pembangunan Daerah Pesisir

Perkembangan pemikiran ilmu administrasi negara tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kedisiplinan keilmuan pada umumnya, yang lebih melihat pada fenomena yang disebut pembangunan. Kemudian perkembangan dalam studi-studi pembangunan itu sendiri banyak terjadi pembaharuan, baik dalam menelaah gejala secara perspektif maupun cara pendekatan atau model penalarannya. Administrasi pembangunan berkembang sebagai suatu kecenderungan baru dalam ilmu administrasi negara, dimana administrasi pembangunan lebih mengaitkan diri pada konteks sosial masyarakat negara-negara membangun.

Sedangkan Afiffudin (2010: 37) memberikan definisi dari pada administrasi pembangunan adalah:

"Administrasi negara yang berperan sebagai agen perubahan (*agen of change*) dengan tujuan mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya, melalui perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan, transfer teknologi, transformasi sosial, pengelolaan kapasitas dan partisipasi masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan".

Berdasarkan pemikiran mengenai hakekat pembangunan, dimana administrasi pembangunan yang dikaitkan pada fokus pembangunan yang telah dipaparkan oleh para ahli, menunjukkan bahwa bidang pengamatan administrasi pembangunan meliputi antara lain masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi umum pemerintah, maupun dalam pelaksanaan pembangunan yang difokuskan kepada keterlibatan masyarakat dan pemberdayaannya. Pada umumnya bahwa administrasi pembangunan lebih memusatkan diri pada masalah pengadministrasian, atau dengan kata lain fungsi pemerintahan dalam pembangunan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah dalam konteks administrasi pembangunan juga harus dapat membangkitkan pemberdayaan masyarakat. Karena tanpa pemberdayaan itu pembangunan



tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Pembangunan oleh pemerintah harus bersifat inovatif, menyukai gagasan-gagasan baru maupun untuk membangkitkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan daerah pesisir adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan dari daerah-daerah yang memiliki batas dengan lautan. Sehingga dari lokasi daerah yang menjadi batas daratan ini memerlukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dalam memanfaatkan potensi yang ada, sebagaimana pandangan dari Adisasmita (2006:6) yang menyatakan:

"Daerah pesisir mencapai garis pantai meliputi, daerah permukiman nelayan dan terutama penangkapan ikan dilaut yang luas sampai kepada tempat pengumpulan (tempat pendaratan ikan) dan jalur pemasarannya ke pasar-pasar lokal dan regional agar terlaksana secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan perencanaan dan penataan kawasan pesisir dan pantai. Pengelolaan sumberdaya kelautan meliputi banyak aspek, bukan hanya berkaitan dengan berbagai jenis sumber daya kelautan dan pesisir pantai, prasarana dan sarana penangkapan ikan, akan tetapi modal usaha dan kemampuan sumberdaya nelayan, kelembagaan ekonomi dan sosial dan masyarakat nelayan perlu ditingkatkan".

Untuk itu, pelaksanaan pembangunan di kawasan pesisir memerlukan pelaksanaan yang bukan hanya bersifat pembangunan fisik saja, diperlukan peningkatan kemampuan dari pada masyarakat setempat menjadi landasan dalam menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan secara fisik dan masyarakat nelayan sendiri. Dimana dari kondisi saat ini daerah pesisir masih memiliki penduduk yang sangat minim tingkat pengetahuannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam pesisir. Hal ini terlihat dari sangat minimnya kreasi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang berbasis teknologi, bahkan dalam mengetahui tentang kawasan pesisir di dalam negeri sendiri buku-buku yang ada sangat langka dan jika ada buku-buku yang ditulis masih dalam bahasa asing. Ghurfan dan Kordi (2012:142).

Kurangnya perkembangan nelayan atas pemanfaatan sumberdaya alam di pesisir menyebabkan minimnya pertumbuhan daripada pembangunan di kawasan ini. Sehingga Kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan banyak

yang terbengkalai karena tidak dilakukannya pemanfaatan pasca pelaksanaan pembagunan. Berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Apridar. et. all (2011:22) menyatakan bahwa setiap tahun target-target pembangunan kelautan dan perikanan banyak yang mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Akibatnya kelestarian sumberdaya ikan nasional saat ini semakin terancam. Selain itu juga kesejateraan nelayan dan pembudidaya ikan nasional cenderung mengalami penurunan. Ghurfan dan Kordi (2012:138) kembali menyatakan "Dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 desa dikategorikan sebagai desa pantai atau desa pesisir dan di pulau-pulau adalah katong-kantong kemiskinan yang potensial dengan permasalahan sangat kompleks. Namun, dibalik dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi nelayan, terdapat potensi ekonomi yang sangat menjanjikan"

Hubungan kesejateraan rakyat dengan ekonomi kelautan oleh Apridar. et. all (2011:15) menyatakan "Ekonomi kelautan yakni menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ghurfan dan Kordi (2012:148) menekankan perlunya pengelolaan masyarakat pesisir untuk lebih melestarikan ekosistem pesisir, dinyatakan sebagai berikut: "Masyarakat pesisir yang tahu dan paham mengenai kelestarian ekosistem pesisir diharapkan mampu untuk menggunakan cara-cara pemanfaatan ekonomi ekosistem pesisir yang lebih lestari dan ikut mengawasi dan menjaga kawasan tersebut". Adisasmita (2006:56) menyatakan penentuan kawasan pantai (dan perairan) sebagai suatu strategi pemanfaatan tata ruang lahan daratan dan wilayah perairan/lautan secara optimal, mempunyai beberapa sasaran penting, yakni:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor yang berada pada kawasan yang bersangkutan (sub sektor tanaman pangan, sub sektor perikanan darat, sub sektor perikanan laut dan sebagainya);
- b. Meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan golongan masyarakat lainnya;
- c. Mencegah membesarnya perbedaan tingkat pertumbuhan antara sektor/wilayah daratan dan sektor/wilayah perairan (lautan) dan;



- d. Mengurangi migrasi penduduk ke kota-kota besar atau ke daerah lainnya.

Adisasmita (2006:68) mengemukakan beberapa permasalahan yang penting dihadapi dalam pemanfaatan dan pengelolalaan sumber daya perairan laut adalah:

a. Aspek Sosial:

- 1) Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
- 2) Masih rendahnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan di berdayakan dalam berbagai proses pengambilan keputusan untuk Pengelolaan sumberdaya kelautan.

b. Aspek Ekonomi:

- 1) Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perairan laut karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah;
- 2) Masih perlunya ditingkatkan secara lebih terpadu koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh instansi-instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan laut.

c. Aspek Ekologi:

Masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan memantulkan ekosistem pesisir dan laut, sehingga terjadi banyak pengurusan hutan mangrove, terumbu karang dan padang lumun untuk kepentingan jangka pendek.

d. Aspek Administratif

Dari segi administratif Adisasmita (2006:69) menyatakan juga terdapat isu dari segi administratif adalah:

- 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama pada masyarakat bahari;
- 2) Lemahnya kemampuan kelembagaan pada sektor pemerintah dan masyarakat;
- 3) Belum dikelolanya potensi sumberdaya kelautan khususnya perikanan

se secara optimal sebagai suatu usaha yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan daerah masyarakat;

- 4) Sektor andalan dalam pembangunan daerah;
- 5) Kurang memadainya pembangunan di wilayah kepulauan baik dalam pembangunan prasarana sosial maupun prasarana fisik.

2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Hikmat (2006: 201), mengemukakan bahwa:

"Pemberdayaan dapat merupakan salah satu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan antara lain bermakna bahwa suatu masyarakat tersebut menjadi bagian dari pelaku pembangunan itu sendiri. Berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain bagaimana suatu inovasi yang lebih maju dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana budaya lokal (termasuk kearifan lokal), bagaimana pula mekanisme pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan tersebut".

Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai keajahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (bergaining position) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis.

Satria (2001: 44) menyatakan:

"Program pemberdayaan harus bisa mendorong terciptanya mobilitas vertikal masyarakat nelayan Kemandirian masyarakat nelayan merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan secara berkelanjutan".



Sedangkan Kusnadi (2009: 130) menyatakan:

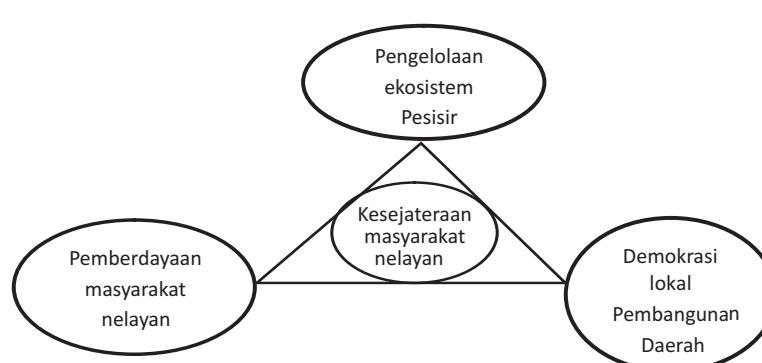
"Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial. Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi yang dimiliki, kapasitas politik pembangunan, dan memegang teguh prinsip-prinsip sosial yang diyakini bisa menciptakan tata kehidupan yang lebih baik".

Sebagaimana pernyataan diatas, proses pemberdayaan nelayan memerlukan kegiatan yang tidak hanya bersifat pemberian hadiah (charity), tetapi diperlukan kegiatan yang dapat mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir yang sehat tanpa pemanfaatan yang berlebihan. Oleh karena itu agar pemanfaatan sumberdaya alam tidak berlebihan, diperlukan kegiatan pengelolahan yang tidak hanya sekedar menangkap ikan melainkan dengan pengembangan tambahan nelayan dalam mengelolah sumberdaya alam seperti budidaya terumbu karang, pengelolaan mutiara dan kegiatan yang sejenisnya".

Apridar. et. all (2011:156-157) menjelaskan "Posisi pemerintah daerah hanya sebagai koordinasi, sumber data dan informasi. Kembali Apridar. et. all (2011: 157) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

nelayan harus mengedepankan tiga pilar sebagai berikut:

"Pilar yang membangun pengembangan ekonomi kelautan pada daerah pesisir adalah: 1) Demokrasi lokal Pembangunan daerah pesisir; pembangunan yang lebih mengedepankan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal dalam menghadapi ancaman perubahan iklim global yang jelas berimplikasi terhadap kondisi pesisir dan pulau-pulau kecil, 2) Pengelolaan ekosistem pesisir; Penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat local/adat/tradisional terhadap kepentingan pemilik modal besar yang berpotensi merusak kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan serta perlindungan terhadap varitas-varitas lokal dan endemik yang merupakan kekayaan alam Indonesia pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, 3) Pemberdayaan masyarakat nelayan; dalam membangun kelautan secara regional berbasiskan pemberdayaan yang berbasiskan nilai-nilai tradisional, budaya, dan kearifan lokal dalam menciptakan kesetaraan ekonomi masyarakat. Nilai menjadi modal sosial bagi mengelola strategis adaptasi terhadap perubahan iklim. Kekuatan ekonomi ini nantinya berujung pada kemandirian dan kedaulatan ekonomi di bidang kelautan. Digambarkan dalam gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Mainstreaming Pengembangan Ekonomi Kelautan Secara Regional

Tiga pilar diatas diharapkan akan lebih baik dalam merubah paradigma ini dari pendekatan komoditas kepada Pengelolaan subjek (manusianya)". Dalam Apridar. et. all (2011:143) terjadi perubahan paradigma saat ini dalam pengelolaan masyarakat pesisir dengan paradigma ke masa depan

"Tiga pilar pembangunan ini, pada akhirnya akan melahirkan strategi pengentasan kemiskinan, Pengelolaan sumberdaya alam hingga adaptasi lingkungan dengan pendekatan ekologis maupun ekosistem secara spasial

maupun lokalitas. Pola pendekatan ini akan merekonstruksi kembali bentuk-bentuk kearifan lokal dan tradisional dalam membangun kedaulatan wilayah laut dan berkelanjutan sumberdaya alamnya".

a. Pengorganisasai nelayan di seluruh Indonesia melalui pengembangan organisasi nelayan yang otonom, kuat dan mandiri. Guna mewujudkan organisasi nelayan yang genuine dan kuat karakteristiknya:

- 1) Memiliki akar yang kuat secara komunitas/komunal di masyarakat;

- 2) Basis ekonomi riilnya yaitu aktivitas perikanan tangkap maupun budidaya yang sudah menjadi sumber kehidupan masyarakat;
 - 3) Mampu menyampaikan/mengaktualisasikan kepentingan mereka sendiri.
- b. Mengembangkan solidaritas komunal, desa dan kelembagaan ekonomi nelayan yang kuat berbentuk koperasi. Membangun solidaritas dalam kelembagaan koperasi kuat di level nelayan mesti mendapatkan dukungan dari organisasi nelayan yang kuat dan otonom;
- c. Mewujudkan kedaulatan pangan di dalam rumah tangga nelayan. kebijakan kedaulatan pangan ini mesti didukung oleh (i) penguatan kelembagaan koperasi (ii) keterlibatan dan dukung *civil society* termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga sosial kemasyarakatan (iii) keterlibatan Perguruan Tinggi di tingkat lokal daerah maupun provinsi di seluruh Indonesia dan (iv) organisasi masyarakat (termasuk organisasi di tingkat akar rumput yang berbasis adat maupun agama)

Dalam Apridar. et. all (2011:181) mengemukakan setidaknya ada berbagai kebijakan yang mendorong kegiatan yang berpihak pada pemberdayaan nelayan yakni:

- a. Pemerintah bermitra dengan organisasi gerakan masyarakat sipil menfasilitasi organisasi-organisasi rakyat *genuine* buat merehabilitasi dan merestorasi ekosistem maupun kawasan pesisir. Organisasinya berbasis ekosistem, umpamanya Badan Pengelola Daerah perlindungan Mangrove (BPDPM) Pulau Pahawang (Kompas, 1/10/2010);
- b. Memberikan isentif berupa jaminan sosial (pendidikan) dan kesehatan bagi organisasi rakyat (OR) atau Kelompok Masyarakat Sipil yang sukses merehabilitasi, merestorasi sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya, ekosistem dan lingkungan pesisirnya;
- c. Pemerintah mesti menerapkan pajak progresif lingkungan pada orang, kelompok orang dan badan usaha yang aktivitasnya berpotensi memusnakan ekosistem pesisir hingga mengancam kehidupan flora dan fauna endemiknya.

Menurut Kusnadi (2009: 47) Secara geografis, masyarakat nelayan adalah:

"Masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antar wilayah darat dan wilayah laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kekuatan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari". Menurut Kusnadi (2003: 66-67) ada 2 sebab yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Sebab-sebab internal ini mencakup masalah. Keterbatasan kualitas sumber daya manusianelayan, Keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, Hubungan kerja pemilik perahu nelayan buruh dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh, Kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, Ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan Gaya hidup yang dipandang boros sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal ini mencakup masalah Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial. Sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, Kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan terumbu karang, dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir, Penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, Penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan, Terbatasnya teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca panen, Terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, Kondisi alam dan *fluktuasi* musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan Isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.



Chambers (1988: 23) menyatakan kemiskinan adalah sebagai berikut:

"The are often inconspicuous, inarticulate and unorganized. Their voices may not be heard at public meetings in communities where it is customary for only the big men to put their views. It is rare to find a body or community or area. Outsiders and government official invariably find it more profitable and congenial to converse with local influentials than with the uncommunicative poor".

Selanjutnya Mulyadi (2007:93) mengatakan:

"Bawa sesungguhnya, ada dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut. Hal ini disebabkan sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang dapat digunakan untuk keperluan yang mendesak. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya dihadapkan para juragan yang telah mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil".

Zamzani dalam Apridar. et. all (2011:97) membagi nelayan yakni:

a. Berdasarkan alat tangkap:

- 1) Nelayan pemilik, yaitu nelayan yang mempunyai alat penangkapan, baik yang berlangsung turun ke laut maupun yang langsung menyewakan alat tangkapan kepada orang lain;
- 2) Nelayan buruh, atau nelayan penggarap, yaitu nelayan yang tidak memiliki alat penangkap, tetapi mereka menyewa alat tangkap dari orang lain atau mereka yang menjadi buruh atau pekerja pada orang yang mempunyai alat penangkapan.

b. Berdasarkan sifat kerjanya nelayan:

- 1) Nelayan penuh atau nelayan asli, yaitu nelayan baik yang mempunyai alat penangkap atau buruh yang semata-mata pada sektor perikanan tampa memiliki usaha yang lain.
- 2) Nelayan sambilan, yaitu nelayan yang memiliki alat penangkapan atau juga sebagai buruh pada saat tertentu melakukan kegiatan pada sektor perikanan disamping usaha lainnya.

Apridar. et. all (2011:204) mendefenisikan: "Nelayan Indonesia adalah nelayan Indonesia terdiri dari nelayan menangkap ikan di laut dan diperairan umum yang bersifat terbuka seperti danau, sungai dan bendungan". Apridar. et. all (2011:92) mendefenisikan nelayan yang tidak memiliki alat produksi berupa kelotok atau pukat beserta segala perangkatnya digolongkan sebagai nelayan buruh (anak buah)". Kusnadi dalam Apridar. et. all (2011:92) menyatakan bahwa: "Nelayan buruh masyarakat miskin yang dominan di desa-desa nelayan. Sedangkan nelayan yang memiliki alat produksi kelotok atau pukat disebut juragan. Sementara posisi yang menanamkan investasi (pemodal) disebut penampung. Mereka ini tak termasuk nelayan yang berkerja mengantungkan dirinya pada nelayan". Apridar. et. all (2011:93) juga mendefenisikan jenis peralatan nelayan yang dibedakan dalam jenis tipe sebagai berikut: "Peralatan tradisional yaitu semua perlengkapan yang digunakan tak didukung oleh mesin untuk menggerakkan perahu yang dipakai dalam operasi penangkapan ikan. Peralatan semi modern yaitu sebagai peralatan tradisional karena belum modern".

C. METODE

Sesuai dengan tujuan penelitian tesis untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program PDPT Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan penulis merasa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. informan yang telah diteliti pada penelitian ini untuk memperoleh gambaran atau informasi mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Program PDPT di Desa Silo Baru. Sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Masyarakat Desa Silo Baru	5 (Orang)
2	Tokoh Masyarakat Desa Silo Baru	1 (Orang)
3	Ketua KMP Desa Silo Baru	6 (Orang)
4	Anggota KMP Desa Silo Baru	6 (Orang)
5	Kepala Desa Silo Baru Desa Silo Baru	1 (Orang)
6	Motivator Desa Laki-Laki	1 (Orang)
7	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Asahan	1 (Orang)
8	Camat Silau Laut	1 (Orang)



9	Kepala Bidang Pengembangan SD Perikanan dan Kelautan Kab. Asahan	1 (Orang)
10	Koordinator Tenaga Pendamping Program PDPT Desa Silo Baru	1 (Orang)
JUMLAH		24 (Orang)

Sumber: Diolah Peneliti.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini meliputi: wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan kajian dokumen. Menggunakan lima teknik uji kredibilitas yaitu triangulasi sumber data dan metode, serta member check. Prosedur dan analisis data dilakukan dengan mempedomani model interaktif Miles and Huberman (Silalahi, 2012:340) dan teknik analisis *Content Analysis* dan *Visual Interpretasi*.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh yang selanjutnya disebut PDPT adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri KKP. Keberadaan PDPT ini terdiri dari kegiatan-kegiatan bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur/lingkungan, usaha dan siaga bencana dan perubahan iklim. Program PDPT merupakan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang ada di desa pesisir seperti Desa Silo Baru, kegiatan yang dilakukan pada program ini meliputi pemberian pelatihan, pembentukan kelompok nelayan, dan pemberian bantuan langsung masyarakat (BLM).

Pelaksanaan PDPT di kabupaten/kota yang telah terpilih, diberi kewenangan untuk menetapkan sebanyak 3 (tiga) desa pesisir yang akan diberikan bantuan dari kegiatan PDPT. Dalam hal ini pembentukan Tim Teknis untuk mengelola pelaksanaan PDPT di Kabupaten dibentuk oleh Bupati/Walikota. Sedangkan untuk penetapan Tenaga Pendamping, Tim Pemberdayaan Desa dan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) di putuskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di kabupaten/kota tersebut. Kelompok Masyarakat Pesisir yang selanjutnya disebut KMP, adalah kumpulan masyarakat terorganisir yang mendiami wilayah pesisir dan melakukan kegiatan usaha di pesisir ataupun melaksanakan usaha lainnya serta kegiatan yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini keberadaan dari KMP sendiri menjadi obyek dari kegiatan

pemberdayaan untuk Program PDPT yang dilaksanakan dari keseluruhan jumlah KMP pada Program PDPT Tahun 2013 di Kabupaten Asahan, pada proses pemilihannya telah melalui identifikasi, seleksi dan verifikasi. Pada Desa Silo Baru terkait sebagai desa pesisir yang terpilih untuk mendapatkan sentuhan Program PDPT, KMP yang terpilih sebanyak enam KMP. Jumlah dari KMP penerima BLM-Program PDPT di Desa Silo Baru sebanyak enam KMP. Dalam hal ini KMP-KMP yang terpilih berasal dari berbagai dusun yang ada di Desa Silo Baru. KMP sebagai penerima bantuan PDPT, menjadi sasaran pengembangan dari setiap kegiatan bina yang dilaksanakan, kegiatan bina yang diberikan dapat berupa kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, rehabilitasi lingkungan, pelatihan komunitas nelayan, dan sebagainya. Setiap kegiatan bina yang di jalankan haruslah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh desa pesisir.

Pada dasarnya program PDPT yang dilaksanakan di desa pesisir yang ada di Kabupaten Asahan mengacu kepada Rencana Pengembangan Desa Pesisir (RPDP). RPDP adalah perencanaan pembangunan dan pengembangan desa selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh desa dan difasilitasi oleh pemerintah daerah secara partisipatif di tiap-tiap desa. Dengan mempertimbangkan profil desa pesisir, hasil dari musyawarah perencanaan dan pengembangan desa (*musrenbangdes*), rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa), dan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi rinci kabupaten/kota, maka RPDP dibuat. Keberadaan dari RPDP sebagai referensi dalam penyusunan rencana detail kegiatan pengelolaan desa pesisir. Dalam hal ini, kegiatan-kegiatan pengelolaan dapat meliputi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang dijabarkan dalam lima fokus pengelolaan kegiatan yaitu pada Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim, Bina Lingkungan dan Infrastruktur, Bina Sumberdaya, Bina Manusia, dan Bina Usaha.

Khusus pada Bina Manusia, kegiatan yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong



royong, tanggung jawab, disiplin, dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif. Dalam hal ini, penulis menilai dari kegiatan bina manusia yang dilaksanakan oleh Program PDPT di Desa Silo Baru, dimana konsep dari pemberdayaan nelayan bisa dioptimalkan. sehingga bina manusia menjadi jalan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan di Desa Silo Baru melalui strategi pemberdayaan.

Dubois dan Miley dalam Hikmat (2006:43) menegaskan diperlukan perubahan paradigma dalam memberdayakan masyarakat dari kecendrungan mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan agar individu tersebut berdaya menjadi paradigma yang memberdayakan secara kolektif dengan memahami persiapan kerjasama, pembentukan kemitraan dan penentuan arah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian bina kegiatan manusia pada Program PDPT di Desa Silo Baru dalam rangka mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pendekatan kepada pengembangan kelompok masyarakat sesuai dengan model strategi pemberdayaan masyarakat Dubois dan Miley dalam Hikmat (2006). Dengan demikian, program Bina Manusia di Desa Silo Baru dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan, pengadaan fasilitas umum, penyediaan tenaga kesehatan dan lain-lain. Sehingga diharapkan pelaksanaan program Bina Manusia ini dapat memberikan perubahan paradigma kepada nelayan-nelayan Desa Silo Baru yang tergabung dalam KMP menjadi kelembagaan nelayan yang kuat dan memiliki budaya kerja yang berkembang.

Kondisi desa pesisir selama ini pada umumnya sangat rentan dari segi ekonomi, sosial, lingkungan dan fisik. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan masih mengalami keterpurukan kondisi secara ekonomi. Hal ini, ditandai dari tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir yang belum mengalami perubahan dari dulu. Kondisi yang demikian, dialami juga oleh masyarakat nelayan Desa Silo Baru yang masih dikatakan kurang berdaya. Posisi dari desa ini yang langsung berhadapan dengan laut dikawatirkan akan rentan jika terkena bencana ataupun perubahan lingkungan yang sering terjadi di desa-desa pesisir. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Silo Baru dalam menghadapi bencana

dan perubahan iklim haruslah didasari dengan meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat nelayan di desa ini yang masih rendah. Pelaksanaan Program PDPT di Desa Silo Baru merupakan aksi yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat nelayan desa pesisir agar lebih mandiri dan berkembang. Dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan kondisi pesisir dari Desa Silo Baru. Untuk itu, peran pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh.

Desa Silo Baru juga rentan secara lingkungan dan fisik. Secara umum kualitas infrastruktur desa tergolong rendah, seperti kondisi jalan yang rusak, kekurangan energi listrik, kesulitan air bersih, sanitasi yang buruk, serta kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, baik akibat kondisi iklim pantai yang sering berubah maupun aktivitas manusia. Kondisi vegetasi dan ekosistem di Desa Silo Baru secara umum telah mengalami kerusakan, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan bina Program PDPT yang dijalankan di desa ini diharapkan dapat mewujudkan perbaikan kondisi lingkungan dan masyarakat nelayan di desa ini. Dengan meningkatnya kondisi nelayan di Desa Silo Baru menjadi lebih berdaya saing tentunya akan dapat mendukung pembangunan daerah pesisir yang diharapkan. Dengan demikian, bagaimana pelaksanaan program PDPT Di Desa Silo Baru dalam memberdayakan masyarakat nelayan, dapat diuraikan keterkaitannya dengan tingkat pembangunan daerah pesisir dari program PDPT di Desa Silo Baru, pengelolaan ekosistem daerah pesisir yang terjadi melalui program PDPT di Desa Silo Baru, dan kemandirian dari masyarakat nelayan melalui program PDPT di Desa Silo Baru sebagai berikut:

1. Pembangunan Daerah Pesisir Melalui Program PDPT di Desa Silo Baru

Program pemberdayaan masyarakat nelayan pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah pesisir yang berkelanjutan. Dengan adanya peningkatan kapasitas dari nelayan sebagai masyarakat yang melakukan aktivitas dan menetap di wilayah pesisir tersebut, akan menopang keberhasilan dari pembangunan daerah pesisir.



Dalam program PDPT, Desa Silo Baru sebagai daerah yang menjadi obyek kegiatan bina pada program ini memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya. Sehingga kegiatan bina yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan kondisi yang diperlukan dari desa tersebut. Banyaknya pilihan kebutuhan mengenai sasaran perlu dibangun menjadi kompleksitas isu di Desa Silo Baru, untuk itu diperlukan prioritas dalam proses pelaksanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang paling diperlukan oleh masyarakat Desa Silo Baru menjadi hal penting agar kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tidak menjadi sia-sia. Ketepatan waktu dalam proses pelaksanaan, pemilihan lokasi pembangunan, bahan yang akan digunakan, bentuk bangunan apa yang akan dibangun, serta kelompok nelayan yang akan melaksanakan kegiatan bina, menjadi kajian penting yang harus dipikirkan oleh pelaksana kegiatan bina Program PDPT di Desa Silo Baru.

Ketepatan waktu dalam pembangunan dirasa penting pada kegiatan bina Program PDPT di Desa Silo Baru, dikarenakan kondisi iklim dari desa ini sebagai desa pesisir sering berubah-ubah. Sehingga KMP selaku pengelola kegiatan dari bina PDPT haruslah komitmen dalam menyepakati jadwal pembangunan dan penyelesaian kegiatan yang sudah dipercayakan kepada mereka. Dengan demikian, keterlambatan penyelesaian kegiatan tidak hanya memperlihatkan rendahnya tingkat kemandirian dalam pemberdayaan nelayan yang ada dalam KMP tersebut, tetapi juga sasaran pembangunan daerah pesisir yang ingin ditingkatkan dari desa ini menjadi terhambat. KMP terkait sebagai pengelola kegiatan dari bina Program PDPT di Desa Silo Baru, diberikan BLM untuk melaksanakan kegiatan bina sesuai dari Rencana Kerja Kelompok (RKK) yang mereka buat. Walaupun pada pelaksanaan dan penyusunannya mereka dibantu oleh tenaga pendamping yang disiapkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Asahan serta Tim Pemberdaya Desa Silo Baru.

Dari Tahun 2012 semenjak Program PDPT ini masuk ke Desa Silo Baru, sudah banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh KMP. Dari enam KMP yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan bina di Desa Silo Baru, ada beberapa kegiatan bina yang dilaksanakan sendiri oleh satu KMP, ada kegiatan bina

yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa KMP. Pada Tahun 2013 dalam usaha untuk meningkatkan pembangunan daerah pesisir di Desa Silo Baru, kegiatan bina yang dilakukan Program PDPT mengarah kepada kegiatan pembangunan fisik dan ketangguhan desa. Hal ini dilakukan agar kondisi dari Desa Silo Baru dapat lebih tangguh dari keadaan sebelumnya, dimana banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menghindari bencana-bencana yang dapat menimpa Desa Silo Baru. Kegiatan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim dengan jumlah dana sebesar Rp.267.856.000,00.

Pelaksanaan Kegiatan Bina Siaga Bencana dan Perubahan Iklim yang dilakukan di berbagai dusun di Desa Silo Baru. Dimana lokasi dari kegiatan disesuaikan dengan fungsi dan sasaran hasil dari kegiatan bina siaga bencana dan perubahan iklim. Adapun kegiatan pembangunan dari bina siaga bencana dan perubahan iklim seperti pembangunan tanggul penangulangan banjir. Pada pembangunan tanggul penangulangan banjir yang dilaksanakan di Dusun VII Desa Silo Baru. Dimana kegiatan pembangunan ini dilakukan di sekitar jalan menuju area pemukiman dan perkebunan warga desa Dusun VII. Lokasi pembangunan ini berbatasan dengan Dusun VI, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Desember 2013 dan dilaksanakan oleh 4 KMP yaitu KMP Bintang Nelayan, Bahagia, Berohol Jaya, dan KMP Bersatu dengan jumlah dana sebesar Rp.240.000.000,00 dengan ukuran tinggi = 2 meter, lebar = 3 meter dan panjang 4.800 meter sehingga masing-masing KMP mendapat alokasi dana Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk kegiatan pembuatan tanggul pengendali banjir sepanjang 1.200 meter. Lokasi pembangunan tanggul pengendali banjir ini berupa lahan kosong milik negara yang kondisinya berupa tanah gersang diisi oleh rerumputan liar, sering digunakan sebagai jalan dan tempat ternak warga desa untuk makan karena ditumbuhi rerumputan. Lokasi ini juga berada dan berbatasan dengan area perkebunan warga desa.

Dalam kegiatan bina yang dilaksanakan diperlukan pendampingan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi adanya benturan jadwal antar KMP, seharusnya tenaga pendamping beserta tim pemberdayaan desa terlibat untuk mengarahkan bahwa tahapan



kegiatan mana dulu yang harus dilakukan KMP. Untuk itu dimana tim pemberdayaan desa beserta tenaga pendamping haruslah melaksanakan kegiatan pelatihan terlebih kepada KMP sehingga KMP menjadi kompeten untuk mengerjakannya, begitu juga dengan keberlanjutannya hingga selesai. Hal lain yang dirasa perlu dalam proses pelaksanaan ini dimana tim pemberdayaan desa haruslah menggambarkan terlebih dahulu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan tanggul dan bagaimana mempergunakan peralatan yang telah disiapkan sehingga KMP secara demokrasi diberikan kesempatan mengenai tahapan mana yang dipilih untuk dikerjakan dan apa dasarnya KMP memilih mengerjakan tahapan itu, selanjutnya tahapan mana yang seharusnya dapat dikerjakan secara bersama-sama untuk mempercepat pembangunan tanggul di Desa Silo Baru.

Untuk mengoptimalkan pembangunan daerah pesisir pada kegiatan-kegiatan Program PDPT ini di Desa Silo Baru, maka pelaksanaan ketepatan waktu penyelesaian kegiatan yang sudah di rencanakan haruslah tepat. Dimana kegiatan-kegiatan pembangunan diharapkan memberikan perkembangan dari masyarakat sebagai sasaran pembangunan daerah pesisir di desa ini. Lokasi dari kegiatan pembangunan yang di laksanakan, akan menjadi daya ungkit yang sesuai dari sasaran pembangunan daerah pesisir yang diharapkan. Sesuai dengan hasil pengamatan langsung di Desa Silo Baru, Dari kegiatan pembangunan yang dilakukan program PDPT ternyata belum dapat menunjukkan tingkat pembangunan fisik maupun infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih rusaknya kondisi jalan di dusun V yang tergenang oleh banjir dan lumpur. Sehingga untuk dilewati oleh kendaraan roda empat tidak bisa. Dengan demikian, agar kegiatan bina dapat membangun secara optimal, pada tahap pelaksanaan harus mengedepankan kualitas dari kegiatan yang dilaksanakan. Pada kegiatan bina infrastruktur dan lingkungan di Desa Silo Baru, ada kegiatan pembangunan berupa bantuan perbaikan rumah nelayan, dimana dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan, program PDPT di Desa Silo Baru berusaha memberikan bantuan kepada peningkatan kondisi dari pemukiman nelayan di desa ini. Namun Sebagaimana ketika pengamatan dilakukan, penulis belum melihat adanya perbaikan kondisi pemukiman

nelayan yang telah terjadi, dimana kondisi dari pemukiman nelayan di Desa Silo Baru masih dalam kondisi yang memperhatinkan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan sebagian besar pemukiman nelayan berada di sekitar muara dan masih berbahan kayu dengan fondasi yang belum kuat.

Ketepatan sasaran pembangunan yang dilakukan pada Program PDPT, menjadi tolak ukur bahwa program ini memberikan dampak terhadap pembangunan Desa Silo Baru. Dengan memperhatikan dari kesesuaian lokasi, ketepatan waktu, dan kesesuaian bahan terhadap kondisi dilingkungan pesisir yang akan dapat memberikan daya ungkit terhadap kehidupan nelayan di Desa Silo Baru untuk lebih berdaya. Kegiatan bina yang dikelola oleh KMP, walaupun berasal dari RKK yang mereka susun, seharusnya diberikan arahan atau pemberdayaan agar dalam melaksanakan kegiatan, KMP lebih mengerti pembangunan seperti apa yang diperlukan saat ini oleh desa mereka. Sehingga pencapaian sasaran pembangunan dapat di sesuaikan dengan kegiatan pembangunan yang paling layak diprioritaskan terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian pada aspek pembangunan daerah pesisir melalui Program PDPT di Desa Silo Baru ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa, program pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Silo Baru melalui program PDPT belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari sarana fisik jalan yang perlu dibangun masih dalam kondisi rusak sehingga akses jalan tersebut susah untuk dilalui oleh kendaraan bermotor. Selain itu juga pembangunan yang telah dilakukan belum dapat membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Silo Baru, terlihat dari kondisi jalan menuju lokasi pondok wisata belum baik, padahal dilokasi tersebut terdapat usaha perekonomian masyarakat seperti penjualan hasil laut.

Selanjutnya tidak adanya koordinasi yang baik antara tim pelaksana teknis kegiatan PDPT dengan tim pemberdaya desa dalam mengarahkan KMP untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan Desa Silo Baru. dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pembangunan di desa ini. Hal ini terbukti masih banyaknya kegiatan pembangunan yang belum selesai dan bantuan perbaikan rumah nelayan yang



tidak sesuai bahan pembangunannya. Dengan demikian, kegiatan program PDPT yang dilaksanakan dinilai tidak sesuai dengan sasaran pembangunan desa pesisir di Desa Silo Baru.

2. Perbaikan dan Pengelolaan Ekosistem Daerah Pesisir Melalui Program PDPT di Desa Silo Baru

Pengelolaan beserta perbaikan ekosistem daerah pesisir di Desa Silo Baru menjadi hal yang penting dalam keoptimalan pelaksanaan Program PDPT. Karena setiap kegiatan bina yang dilakukan haruslah menyeimbangkan dengan sumberdaya pesisir yang ada di desa ini. Hal inilah yang membedakan konsep pemberdayaan yang dilakukan kepada Desa Silo Baru sebagai desa nelayan. Dalam pengelolaan ekosistem di Desa Silo Baru, maka diperlukan kegiatan pengelolaan yang mengedepankan tentang kondisi dari ekosistem yang mengalami kerusakan dan akan di perbaiki, potensi dari ekosistem yang dapat dikembangkan, dan keseimbangan dari ekosistem terhadap pemanfaatan kebutuhan nelayan. Dengan demikian, selarasnya dari setiap kegiatan bina yang dilakukan dapat membangun kelestarian daripada sumberdaya lingkungan yang ada di desa tersebut.

Perubahan dari paradigma masyarakat nelayan yang ada di Desa Silo Baru untuk memanfaatkan sumberdaya alam tampa harus merusak tergolong susah, dikarenakan tingkat kebutuhan nelayan akan ekosistem yang ada menjadikan mereka terlambat berlebihan dalam memanfaatkan ekosistem di desa mereka. Sehingga tampa disadari ekosistem di desa mereka sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk diperbarahuhi. Padahal ekosistem di desa mereka menjadi sumberdaya mereka dalam memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang.

Hilangnya nilai kearifan lokal yang menyebabkan banyaknya dari ekosistem desa ini yang mengalami kerusakan membuat penanaman bibit mangrove di Desa Silo Baru ini menjadi makin penting, dikarenakan tinginya kerusakan ekosistem di Desa Silo Baru dengan adanya penanaman bibit akan menjadi pemberdayaan dalam mengubah atau mengembalikan pola pikir dari masyarakat nelayan untuk lebih mengerti akan pentingnya kelestarian dan keseimbangan dari ekosistem yang sudah ada dari nilai luhur desa ini. Sehingga fasilitator program PDPT dalam

prosesnya memberdayakan nelayan diharapkan bukan sekedar memberikan arahan mengenai pengelolaan ekosistem, akan tetapi lebih kepada nilai dan arti penting keseimbangan ekosistem dalam memanfaatkannya agar lebih dapat menjaga ketangguhan dari Desa Silo Baru sebagai desa pesisir.

Kawasan hutan mangrove yang ada di Desa Silo Baru telah mengalami kerusakan yang parah. Dari kawasan pantai hingga sekitar muara yang ada di Desa Silo Baru terlihat tanaman mangrove seakan sudah punah dari desa ini. Selain aktivitas yang menyebabkan kerusakan terhadap keberlangsungan tanaman mangrove yang berguna sebagai pelindung atau benteng alamiah Desa Silo Baru disaat air laut pasang. Hutan mangrove juga diharapkan akan menjadi lahan wisata mangrove yang nanti akan menarik para wisatawan untuk berkunjung dan menikmati kondisi pesisir yang asri. Oleh karena itu, penulis menilai dengan berdampingannya lokasi hutan mangrove nantinya dengan lahan perkebunan dan pertanian warga Desa Silo Baru para KMP yang mengelola hutan mangrove akan sulit untuk menjaga pemeliharaannya.

Berdasarkan data, adanya beberapa kegiatan PDPT dalam kaitannya dengan pengelolaan ekosistem daerah pesisir. Dapat dilihat dengan adanya kegiatan perbaikan dari ekosistem yang telah rusak maka dapat dihubungkan dengan kegiatan yang kedua yaitu Desa Silo Baru akan berpeluang membuka obyek wisata yang akan mendatangkan keuntungan bagi desa dan tentunya akan meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat yang lebih mandiri. Kegiatan pengelolaan ekosistem di Desa Silo Baru melalui Program PDPT ini, selain mengadaptasi kerusakan ekosistem yang terjadi, maka diperlukan kegiatan-kegiatan dalam merehabilitasi kerusakan yang ada. Kegiatan seperti penanaman bibit mangrove yang diharapkan jika berhasil, manfaatnya akan dapat menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di desa ini, maka kegiatan lain yang dirasa sama pentingnya yaitu berupa pemasangan cerok kayu.

Kegiatan pada Program PDPT yang dilaksanakan di Desa Silo Baru, pada pengelolaan ekosistem daerah pesisir selain memerlukan rehabilitasi kerusakan ekosistem yang ada, memerlukan kegiatan yang bersifat pemeriharaan dari kegiatan perbaikan



yang sudah dilakukan. Bibit mangrove dan pemasangan cerocok kayu tidak akan bertahan ataupun berkembang, jika tidak ada keberlanjutan untuk merawat dan memelihara keberlangsungan dari kegiatan ini. Seperti kondisi dari penanaman bibit mangrove, dimana kondisinya masih belum kuat untuk dibiarkan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Ditambah lagi tingginya aktivitas kegiatan masyarakat disekitarnya akan menjadi penganggu pertumbuhan dari bibit mangrove ini. Berdasarkan pengamatan dilapangan, pertumbuhan dari bibit mangrove yang ditanam di Desa Silo Baru, penulis menilai kondisi dari perkembangan mangrove mengalami kegagalan. Karena dari mangrove yang telah ditanam mengalami kekeringan dan kondisi yang rusak, sehingga dari kondisi yang diamati, tidak akan ada kemungkinan untuk bisa tumbuh.

Proses pendampingan dalam kegiatan yang dilakukan Program PDPT telah berjalan, akan tetapi pelaksanaan pengawasan yang terjadi seakan tidak berjalan, dimana untuk melihat perkembangan dari kegiatan yang dilakukan seharusnya ada pengawasan yang dilakukan secara teratur. Dengan demikian, kegiatan dalam mengelola ekosistem hanya sebatas pelaksanaan yang bersifat sementara tanpa ada keberlanjutan dari kegiatan yang dilakukan. Selain tidak optimalnya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi kerusakan ekosistem yang terjadi di Desa Silo Baru, pemanfaatan pengelola akan potensi yang ada di Desa Silo Baru dinilai masih kurang berdaya. Hal ini dapat dilihat tidak adanya kegiatan pendukung yang mengelola kegiatan bina pada Program PDPT dalam memanfaatkan ekosistem yang ada untuk lebih dikembangkan lagi. Kegiatan seperti dibangunnya pengembangan ekowisata dikarenakan dengan adanya pengembangan ekowisata dapat sebagai daya tarik dalam kelestarian ekosistem yang ada di Desa Silo Baru.

Berdasarkan pengamatan dilapangan seharusnya pihak pemerintah atau tim pemberdaya desa melakukan kegiatan pendukung dalam mengelola ekosistem yang ada di desa ini untuk mengembangkan potensi jika ingin melakukan pengembangan wisata alam pesisir di desa ini. Seperti kondisi lingkungan ekosistem yang terjadi di Dusun VI, dimana dari struktur tanah yang masih pasir pantai dan banyak rawa-rawa yang berisi

genangan air laut tidak dapat dimanfaatkan oleh pengelola Program PDPT sebagai sarana pendukung terciptanya kawasan ekowisata di desa ini. Rawa-rawa dinilai penulis dapat dijadikan tempat pengembangan budidaya hasil laut seperti udang, rumput laut dan kerang, dikarenakan struktur dari tanah yang masih pasir pantai dan kadar air laut akan mendukung kegiatan pendukung ini. Dengan adanya kegiatan dukungan ini akan manambah potensi dari kawasan ini sebagai tujuan wisata kuriner yang diinginkan dari kawasan ekowisata Program PDPT di Desa Silo Baru.

Program PDPT di Desa Silo Baru tetap memberikan perbaikan atas kondisi ekosistem yang ada di desa ini, akan tetapi dari pemanfaatan kegiatan sebenarnya dapat bisa ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kondisi dari ekosistem yang masih ada di Desa Silo Baru sebagai desa pesisir, sebenarnya masih kuat. Untuk itu perlunya pengelolaan yang lebih luas dan serius dapat dilakukan pada program ini dalam mengembangkan ekosistem yang diperlukan di Desa Silo Baru. Pemanfaatan ekosistem yang sebenarnya masih banyak di Desa Silo Baru, tidak dapat diperhatikan oleh pengelola dari kegiatan Prgoram PDPT ini. Masih banyaknya kondisi dari tanaman liar jika dilakukan pengembangan dan pengelolaan akan dapat menjadi sumberdaya yang baik bagi pertumbuhan desa ini tidak dilakukan. Penulis kembali menilai tidak adanya fungsi pendampingan atau juga pemberdayaan yang dilakukan tim pemberdaya untuk mengarahkan atau memberi masukan dari KMP agar dapat melakukan kegiatan yang lebih besar dalam pengelolaan ekosistem di desa mereka. Selain banyaknya potensi ekosistem yang tidak dikembangkan dalam kegiatan bina di Desa Silo Baru, lokasi yang mendapat pengelolaan ekosistem juga tidak dapat dikelola dengan baik pemanfaatan ekosistemnya. Seperti yang terjadi di sekitar lokasi wisata mangrove Dusun VI Desa Silo Baru. Masih terlihat banyaknya lokasi yang tidak terawat, penuh dengan sampah, padahal penulis nilai sebenarnya dapat dijadikan saran pengembangan dalam mengoptimalkan fungsi dari lokasi ini sebagai lokasi ekowisata.

Berdasarkan uraian aspek kedua dari penelitian ini, yang membahas masalah pengelolaan ekosistem daerah pesisir, penulis dapat menyimpulkan bahwa ternyata tujuan dari penanaman bibit mangrove yang telah dilaksanakan pada kegiatan PDPT terlihat



hanya untuk mencari keuntungan sepihak semata, karena dana yang disiapkan untuk kegiatan penanaman bibit *mangrove* sangat besar. Padahal jika ditinjau kembali dari tujuan PDPT ini adalah untuk kepentingan jangka panjang masyarakat Desa Silo Baru dalam rangka peningkatan kondisi dari ekosistem yang ada di desa ini. Sehingga setiap kegiatan rehabilitasi lingkungan tidak dipantau dan hasilnya tidak berkembang. Hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan penanaman bibit mangrove yang dilakukan mengalami kerusakan dan kekeringan, Selain itu ada juga lokasi penanaman bibit mangrove yang dilakukan berdekatan dengan lahan pertanian penduduk, sehingga bibit tersebut rusak akibat aktivitas dari masyarakat disekitar lokasi rehabilitasi lingkungan. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa petugas pendamping yang ditugaskan di desa ini terlihat melakukan pemberian terhadap kegiatan yang dilakukan penduduk yang seharusnya diberikan pengarahan dan bimbingan terhadap seluruh kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, pengelolaan ekosistem yang terjadi belum mengubah dari kerusakan ekosistem yang terjadi, begitupula dengan pemanfaatan lingkungan seakan tidak dilakukan oleh pengelola kegiatan PDPT di Desa Silo Baru.

3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PDPT di Desa Silo Baru

Pemberdayaan masyarakat merupakan inti dari setiap kegiatan program PDPT di Desa Silo Baru. Dimana kegiatan pengelolaan yang melibatkan KMP, bertujuan agar nelayan yang tergabung dalam KMP dapat berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat melatih dan mengembangkan kemampuan daripada nelayan, dan berpolapikir lebih maju. Dengan demikian, penguatan dari pengorganisasian nelayan yang kuat menjadi landasan bagi KMP sebelum di berdayakan, pengembangan solidaritas komunal juga menjadi tahap lanjutan dalam pemberdayaan nelayan di desa ini, dengan bentuk pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan, dalam setiap kegiatan, dan dipadu dengan kekompakan dari pada nelayan untuk berkerjasama, menjadi tolak ukur yang nyata atas keoptimalan pemberdayaan yang dilakukan.

Pengorganisasian nelayan melalui Program PDPT ini di Desa Silo Baru, meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Kapasitas dari organisasi formal seperti instansi-instansi pemerintah terkait memberikan arahan kepada organisasi informal dalam pelaksanaan kegiatan bina, akan medukung keoptimalan dari program ini. Organisasi informal pada Program PDPT yaitu KMP yang ada di Desa Silo Baru. KMP menjadi pengelola setiap kegiatan bina dari mulai mengusulkan RKK hingga melaksanakan pembangunan. Sedangkan organisasi formal yang dalam ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Asahan, Kecamatan Silau Laut, dan Pemerintah Desa Silo Baru, berposisi sebagai pemberi fasilitas dalam membuat RKK dan laporan kegiatan serta bantuan lainnya.

Dalam pelaksanaan dilapangan, KMP di berdayakan oleh tim pemberdaya desa yang diketuai oleh kepala desa sendiri, beserta tenaga pendamping yang disiapkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Asahan. KMP di Desa Silo Baru dalam pemberdayaan masyarakat nelayannya hanya enam, sedangkan tim pemberdaya desa dan tenaga pendamping masing-masing tim berjumlah sebanyak tiga orang. Penulis menilai jumlah KMP yang ada di Desa Silo Baru yang hanya sebanyak enam KMP, akan mengurangi proses pemberdayaan nelayan terhadap seluruh nelayan yang ada di Desa Silo Baru. Jika dibandingkan dengan desa pesisir yang lain di Kabupaten Asahan, Dengan program yang sama dan jumlah anggaran yang sama pula, jumlah dari KMP yang diberdayakan bisa sebanyak sepuluh KMP.

Dengan demikian, pada tahap pengembangan solidaritas komunal di Desa Silo Baru, yang terlihat menjadi perhatian oleh penulis, dimana setiap KMP yang di pilih berdasarkan seleksi dan verifikasi memang mampu dan lebih berdaya setelah mengalami kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh program PDPT yang dilaksanakan di Desa Silo Baru, karena kewenagan untuk memilih KMP untuk terlibat dalam Program PDPT, banyak diserahkan kepada kepala desa, sehingga dapat dilihat apakah setiap KMP di Desa Silo Baru, yang menjadi pengelola kegiatan adalah memang berdasarkan tingkat komunitas nelayan yang memang berkembang atau perlu dikembangkan yang ada di Desa Silo Baru dari kegiatan pemberdayaan yang organisasi nelayan di desa ini.



a. Pengorganisasian Nelayan

Pengorganisasian nelayan pada setiap KMP di Desa Silo Baru, menjadi pendukung pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kelembagaannya melalui pelaksanaan program PDPT ini. Karena itu, pembentukan daripada KMP sebagai penerima bantuan kegiatan, haruslah kelompok-kelompok nelayan yang memang membutuhkan dan memiliki potensi dan kemauan untuk diberdayakan. Sejak diundangkannya Peraturan Dirjen KP3K Nomor: 04/PER-DJKP3K/2013 Tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh. Dalam penyusunan calon penerima BLM PDPT adalah KMP yang memenuhi kriteria Pengurus dan anggota bukan perangkat desa/kelurahan, PNS,TNI/Polri, dan PPTK, Pengurus dan anggota berdomisili di desa/kelurahan setempat, yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Domisili dari kepala desa/lurah, dan Pengurus dan anggota berjumlah maksimal 10 orang.

Dengan demikian, sebagaimana Per Dirjen KP3K mengenai kriteria penerima BLM PDPT, adalah masyarakat nelayan dan tidak di perbolehkan dari oknum pemerintah sehingga memang sasaran dari program PDPT adalah memang warga desa yang berdomisili di desa yang mendapat sentuhan dari kegiatan PDPT ini. Sehingga dari sasarannya program ini, jelas bahwa program PDPT ingin melaksanakan pengembangan kepada nelayan yang membutuhkan peningkatan akan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya. KMP yang dibentuk sebagai organisasi nelayan, struktur yang ada pada pengurus dan anggota berjumlah maksimal sepuluh orang, hal ini penulis nilai efektif, karena akan mempermudah setiap sasaran dari proses pengembangan kepada KMP. KMP akan fokus untuk dipantau setiap kemajuannya ditinjau dalam melaksanakan pemberdayaan tim yang akan melakukan kegiatan pelatihan, maupun mempertajam spesialisasi kemampuan nelayan yang ada.

Pemilihan KMP oleh tenaga pendamping dan tim pemberdayaan desa dengan tetap memprioritaskan KMP yang ada pada Tahun 2012. Sebagaimana kajian dokumen yang dilakukan penulis, identifikasi KMP penerima BLM PDPT Tahun 2013 Desa Silo Baru, dilakukan pada Tanggal 6 Mei 2013. Sedangkan

Seleksi KMP yang kembali dilakukan oleh tenaga pendamping dan tim pemberdayaan desa dengan merujuk pada hasil identifikasi KMP Desa Silo Baru dilakukan pada tanggal 15 Mei 2013. Pelaksanaan indentifikasi dan seleksi yang hanya dilakukan oleh tim pemberdaya desa dan tenaga pendamping saja, dinilai penulis kurang optimal, dikarenakan dengan hanya melibatkan unsur tim pemberdaya desa beserta tenaga pendamping akan dapat berpeluang terjadinya pemilihan KMP yang hanya berdasarkan keinginan oleh kepala desa saja selaku ketua tim pemberdayaan desa. Pelibatan unsur-unsur terkait seperti pihak akademis tokoh masyarakat di desa tersebut dalam menseleksi KMP, dirasa akan lebih efektif dalam memberikan kesesuaian dari kriteria nelayan yang akan di berdayakan.

Sedangkan pada tahap verifikasi KMP yang dilakukan oleh Sub tim teknis, dimana merujuk pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan berita acara hasil verifikasi KMP Penerima BLM PDPT Tahun 2013, maka pelaksanaan identifikasi untuk Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut dilakukan pada tanggal 20 Mei 2013. Kemudian hasil verifikasi tersebut keputusan Kepala Dinas menjadi KMP penerima BLM PDPT. KMP yang terpilih menyusun Rencana Usulan Bersama (RUB) sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat pesisir di Desa Silo Baru yang didampingi oleh tenaga pendamping. Selain dalam penyusunan RUB tenaga pendamping juga melakukan pendampingan terhadap kelengkapan berkas administrasi KMP untuk memenuhi syarat pengusulan RUB kepada tim pemberdayaan desa. Jika terdapat kekurangan pada berkas usulan tersebut, KMP dan tenaga pendamping melakukan perbaikan bersama-sama.

Pengorganisasian nelayan pada KMP di Desa Silo Baru tidak ada gangguan dari intervensi atau kesalahan wewenang yang dilakukan antar instansi terkait. Akan tetapi penulis menilai keterlibatan setiap oknum yang ada di instansi sendiri dalam pembentukan KMP tidak terasa, dan hanya menyerahkan pada tim pemberdaya desa dan tenaga pendamping. Sedangkan dari sudut internal organisasi KMP di Desa Silo Baru sendiri, kegiatan pelaksanaan kegiatan Program PDPT, haruslah menekankan pada pelaksanaan pemberdayaannya terhadap masyarakat nelayan.



Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, penulis menilai dalam kegiatan yang dilakukan pada program PDPT tidak ada monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh KMP di Desa Silo Baru. Pada dasarnya, monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang perkembangan pelaksanaan PDPT yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk memastikan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan. Dengan demikian, hasil dari monitoring diharapkan dapat memberikan informasi yang menyangkut masukan (*input*), pelaksanaan (*proses*), keluaran (*output*), tujuan, dan sasaran pemeberdayaan masyarakat nelayan dari kegiatan Program PDPT ini. Sedangkan pada tahap evaluasi atau penilaian kegiatan, harus dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, evaluasi dilakukan pada akhir pelaksanaan Program PDPT untuk melihat dampak kegiatan secara keseluruhan. Sehingga dari kegiatan ini dapat menjadi acuan bagi upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang dapat terjadi pada pelaksanaan Program PDPT di Desa Silo Baru. Berdasarkan kajian dokumen pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Ditjen KP3K.

b. Pengembangan Solidaritas Komunal

Dalam pengembangan solidaritas komunal Program PDPT di Desa Silo Baru, kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayannya dapat dilihat dari peningkatan kapasitas masyarakat desa yang dilakukan di Desa Silo Baru melalui kegiatan seperti pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan oleh fasilitator dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan. Sasaran kegiatan ini adalah KMP (Kelompok Masyarakat Pesisir) penerima BLM. Untuk itu, peningkatan kapasitas masyarakat desa pesisir ini merupakan bagian dari kegiatan Bina Manusia dan Bina Kelembagaan. Dimana dari kegiatan ini berupa pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat nelayan, serta pertemuan yang didalamnya ada pembinaan dengan menggunakan anggaran non-BLM.

Berdasarkan kajian dokumen, bentuk-bentuk pelatihan yang dilakukan Program PDPT di Desa Silo Baru antara lain Pelatihan kelembagaan dapat berupa pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), pengelolaan Koperasi, pengelolaan organisasi

penanggulangan kebencanaan dan lain-lain, Pelatihan kewirausahaan dapat berupa pelatihan mata pencaharian alternatif, pemasaran dan lain-lain, Pelatihan kesiapsiagaan bencana dapat berupa pelatihan pengenalan bencana, gladi bencana, pembuatan peta resiko bencana dan lain-lain, Pelatihan dinamika kelompok, dan Pelatihan administrasi/manajemen kelompok masyarakat, seperti pelatihan pengelolaan keuangan.

Peserta pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat Desa Silo Baru sendiri adalah Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP), dalam pelaksanaannya juga turut diundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan unsur Badan Pemberdayaan Desa. Pada prosesnya kegiatan pelatihan, dilaksanakan oleh para pendamping dan motivator desa dengan narasumber yaitu para fasilitator yang ditangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Asahan. Pelatihan diawali dengan metode pemberian materi dan diskusi kepada para KMP yang terpilih di Desa Silo Baru. Kemudian, dengan pembebaran pada diskusi sehingga diharapkan dapat menginventarisasi potensi sumberdaya alam yang ada di Desa Silo Baru yang dapat dimanfaatkan dari potensi sumberdaya manusianya. Materi yang diberikan diantaranya adanya pengelolahan hutan *mangrove* dan pemanfaatan mangrove sebagai sumber makanan olahan alternatif, pengelolaan pesisir untuk pencegahan bencana alam dan lain-lain.

Salah satu indikator terjadinya perubahan wawasan, cara pikir dan cara pandang peserta pelatihan adalah dengan memberikan pratest dan *post-test* pada setiap pelatihan yang dilaksanakan. Dari hasil perbandingan kedua tes tersebut, maka akan didapat gambaran seberapa jauh perkembangan yang terjadi. Maka proses pemberdayaan yang dilakukan Program PDPT terhadap nelayan dengan beberapa kegiatan. Untuk itu, kegiatan lokarya yang diikutkan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dari pada nelayan untuk belajar menoptimalkan potensi yang dimiliki mereka.

Dalam Program PDPT, lokakarya dilakukan setelah selesainya seluruh tahapan kegiatan. Lokakarya dilakukan 2 (dua) kali yaitu Lokakarya Daerah dan Lokakarya Nasional. Peserta lokakarya daerah PDPT berasal dari Pemerintah Daerah, Tim Teknis, Camat, Pengelola PDPT, KMP, Masyarakat dan



pemangku kepentingan lainnya. Jumlah peserta lokakarya daerah seperti tercantum dalam RKA-KL PDPT sebanyak 15 orang. Selanjutnya pada kegiatan ini dipaparkan pelaksanaan di masing-masing desa berikut dengan permasalahan yang timbul dan bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan yang baik dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian para nara sumber daerah menyampaikan paparannya disambung dengan pemaparan oleh nara sumber pusat. Kegiatan ini menekankan pada diskusi sehingga umpan balik yang dilontarkan dari para peserta didiskusikan bersama dan dicari solusinya dengan mempertimbangkan pendapat para nara sumber. Sedangkan peserta lokakarya nasional adalah seluruh daerah penerima program PDPT Tahun 2013 ditambah dengan para nara sumber yang berasal dari berbagai lembaga/instansi. Lokakarya nasional memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan PDPT di Kabupaten/Kota terpilih, paparan dari para nara sumber yang berkaitan dengan Program PDPT.

Akan tetapi, penulis menilai kelemahan dari kegiatan pemberdayaan pada program ini, dimana kegiatan lokakarya hanya dilakukan 2 (dua) kali, itupun hanya sekali di daerah dan sekali di tingkat nasional. Sehingga pemberian materi kepada nelayan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu kali tahapan saja. Kemudian, pelaksanaan dilakukan di Kota Kisaran yang letaknya sangat jauh dari Desa Silo Baru, hal ini dinilai penulis sangat tidak tepat, selain para nelayan tidak bisa menyesuaikan materi dengan apa yang mereka hadapi di Desa Silo Baru, jarak tempuh yang ke Kota Kisaran sudah menyebabkan mereka lelah hal ini akan mengurangi daya serap nelayan menerima materi yang diberikan.

Dari uraian pada aspek pemberdayaan masyarakat melalui program PDPT ini, dapat disimpulkan dari dua sisi yaitu pengorganisasian nelayan dan pengembangan solidaritas komunal. Dimana jika dilihat dari sisi pengorganisasian nelayan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Program PDPT sudah memiliki struktur kelembagaan akan tetapi belum dapat di optimalkan dari segi pelibatan setiap anggota dalam mengambil keputusan maupun informasi yang diterima mengenai sumber dana dan besar anggaran yang diterima oleh KMP sehingga setiap kegiatan hanya berupa pemberian komisi kepada anggota. Selanjutnya dari sisi pengembangan

solidaritas komunal, terlihat KMP yang terbentuk tidak benar-benar mencerminkan keterlibatan masyarakat yang seharusnya menjadi anggota KMP. Hal ini diketahui dari masyarakat yang seharusnya menjadi anggota KMP tidak mengikuti kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan. Berkenaan dengan pelatihan yang dilakukan penulis melihat masih terkesan hanya kegiatan seremonial saja dan seperti hanya pertemuan rapat biasa. Seharusnya dalam kegiatan pelatihan dilakukan kegiatan yang benar-benar teknis tentang bagaimana usaha yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang menjadi penerima manfaat dalam hal ini KMP yang telah dibentuk. Sehingga hasil yang didapat dari kegiatan PDPT untuk saat ini belum begitu berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di Desa Silo Baru.

Berdasarkan analisa pada aspek kemandirian masyarakat nelayan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan dari program PDPT telah dapat membawa manfaat yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di Desa Silo Laut Kecamatan Silau Laut. Hal ini terlihat dari usaha-usaha yang dijalankan oleh anggota kelompok KMP sudah mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Akan tetapi Program PDPT belum dapat meningkatkan keseluruhan nelayan yang tergabung dalam KMP, dikarenakan masih banyak kegiatan yang gagal atau tidak optimal sehingga belum memberikan manfaat pengembangan nelayan di Desa Silo baru. Hal ini terlihat dari keberadaan KMP yang ada di Desa Silo Baru, keberadaannya hanya sebatas wadah untuk memperoleh BLM dari Program PDPT yang dilaksanakan. Sehingga kemandirian dari KMP sebagai organisasi yang berdiri atas keinginan dari masyarakat nelayan sendiri belum dapat mewujudkan kesejataaan dari setiap anggota kelompok.

Pelaksanaan program PDPT di Desa Silo Baru dalam pembangunan daerah pesisir, dan pengelolaan ekosistem pesisirnya, serta pemberdayaan masyarakat nelayannya sebagaimana yang telah di paparkan penulis belum dapat memberikan dampak terhadap pembangunan daerah yang diharapkan di desa Silo Baru, sehingga dalam konteks pembangunan daerah pesisir yang berbasis pada pembangunan masyarakat yang kedepannya bertujuan untuk memandirikan



masyarakat nelayan masih dirasa akan cukup jauh jika kondisi pelaksanaan program PDPT masih mengalami kegagalan dalam proses pemberdayaan KMPnya. Ketidakoptimalan kegiatan bina yang dijalankan dikarenakan pengelolaan kegiatan oleh KMP belum dapat memberdayakan setiap nelayan yang tergabung dalam KMP tersebut.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Uraian pada bab-bab sebelumnya yang telah di analisis oleh penulis memberikan suatu gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan program PDPT di Desa Silo Baru dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan. Maka berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kegiatan bina yang dilaksanakan pada pelaksanaan program PDPT di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut dapat dikatakan belum optimal. Dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam kegiatan bina pada program PDPT ini masih belum dapat menciptakan pembangunan desa pesisir yang mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada di Desa Silo Baru. Terdapatnya beberapa gambaran yang memperlihatkan masih tidak mendukungnya faktor infrastruktur seperti akses yang buruk dan pemukiman nelayan yang belum layak huni serta banyaknya bangunan kegiatan bina yang rusak menjadi bukti nyata bahwa tingkat pembangunan desa pesisir di Desa Silo Baru melalui program PDPT belum bisa memberikan kemajuan yang signifikan.
2. Hingga pada tahapan pengelolaan dan perbaikan ekosistem di Desa Silo Baru melalui program PDPT dalam pelaksanaan kegiatan bina masih belum berjalan secara maksimal. Pada kegiatan bina sumberdaya, dimana kondisi dari penanaman bibit mangrove yang hasil dari penanaman ini masih mengalami kerusakan memperlihatkan proses pelaksanaan kegiatan bina yang tujuannya untuk mengelola ekosistem di Desa Silo Baru tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kerusakan hutan mangrove di sekitar wilayah pantai di Desa Silo Baru masih dengan kondisi yang tetap, kondisi dari Desa yang masih tergenang air laur jika sedang pasang menjadi gambaran tingkat ekosistem di Desa Silo Baru belum mengalami perkembangan. Sehingga kegiatan bina program PDPT masih bersifat *charity*, atau pemberian hadiah sementara, bukan pada kemandirian masyarakat nelayannya.
3. Pada pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan melalui kegiatan bina pelatihan tepatnya kegiatan bina manusia di Desa Silo Baru masih belum efektif dalam mengembangkan kemampuan nelayan di Desa Silo Baru untuk menjadi nelayan yang tangguh. Pelatihan-pelatihan yang diberikan masih bersifat umum dan tidak langsung kearah pengembangan masyarakat yang di perlukan nelayan terasa sebagai kegiatan yang hanya bersifat sesaat. Dimana kondisi nelayan yang ada di Desa Silo Baru masih saja berstatus sebagai nelayan kecil. Proses pelatihan yang dirasa tidak tepat karena dilakukan saat siang hari menjadi sering memberikan dampak bagi nelayan yang tergabung dalam KMP di Desa Silo Baru untuk tidak melaut atau beraktifitas dalam memenuhi kebutuhan mereka sehingga setiap materi pelatihan yang mereka dapat dirasa hanya sekedar prasyarat untuk tetap terdata sebagai KMP yang mendapatkan BLM. Kegiatan pelatihan yang dilakukan tidak berkesinambungan melainkan hanya dilakukan dua kali saja dalam waktu dua hari menuju pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dalam mengembangkan kapasitas nelayan tidak konsisten karena dengan kegiatan yang hanya dilaksanakan beberapa kali saja dan tanpa dilakukan pengawasan lanjutan tidak akan meningkatkan kemampuan dari nelayan untuk berkembang.
4. Tingkat kemandirian dari masyarakat nelayan dalam pemenuhan kebutuhan yang tergabung dalam KMP penerima BLM pada Program PDPT yang dilaksanakan di Desa Silo Baru belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Walaupun terdapat beberapa nelayan yang mengalami perkembangan tetapi masih dari sebagian besar nelayan di Desa Silo Baru yang mendapatkan sentuhan dari setiap kegiatan bina pada Program PDPT ini belum bisa meningkat, dari kondisi yang telah di analisis sebagian besar anggota KMP setelah mengikuti kegiatan bina PDPT belum dapat mengubah kondisi kehidupan mereka secara lebih mandiri.



Hal ini dikarenakan tingkat inovasi yang sudah ada tidak dikuatkan oleh tenaga pendamping dan tim pemberdaya desanya dalam mendukung potensi dari masyarakat nelayan dan desa nelayan sebagai penyedia kebutuhan perkotaan.

5. Pelaksanaan program PDPT dalam memberdayakan masyarakat nelayan masih gagal, karena setiap kegiatan bina yang dilaksanakan oleh KMP masih memiliki ketergantungan terhadap tenaga pendamping, tim pemberdaya desa, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Asahan sendiri. Semangat kemandirian belum dapat terlihat dalam melaksanakan kegiatan bina di Desa Silo Baru.

Sesuai dari kesimpulan yang telah dipaparkan. Beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan kegiatan bina pada Program PDPT di Desa Silo Baru sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Asahan hendaknya lebih mengaktifkan koordinasi kepada pihak Kecamatan Silau Laut sebagai SKPD di kecamatan dalam mengendalikan pelaksanaan PDPT, seperti dalam menetapkan lokasi-lokasi yang layak untuk dilaksanakan kegiatan pembangunan di Desa Silo Baru. Seperti pada perbaikan akses jalan yang rusak dimana dengan adanya pihak kecamatan akan dapat mengarah kegiatan perbaikan jalan yang rusak yang menghubungkan dengan desa lain, agar tingkat mobilisasi penduduk ke desa lain dapat lebih mudah dan cepat.
2. Meningkatkan pengawasan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan kepada tenaga pendamping dan KMP dalam mengoptimalkan kegiatan bina PDPT. Dimana upaya yang telah dilakukan oleh Desa Silo Baru selama ini dalam menugaskan tenaga pendamping dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan PDPT dengan cara memberikan laporan mengenai perbaikan kerusakan bibit mangrove di Desa Silo Baru belum ada sanksi atau keberlanjutannya atas gagalnya kegiatan pengolaan dan perbaikan ekosistem..
3. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan harus lebih intens dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada KMP. Upaya yang telah dilakukan dalam proses pemberian pelatihan selama ini hanya berupa pertemuan dan sosialisasi dengan masyarakat nelayan yang tergabung dalam KMP tidak dapat meningkatkan kemampuan nelayan di Desa Silo Baru untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya. Untuk itu sebaiknya dilakukan pemantauan terhadap materi yang diberikan dan perkembangan dari setiap anggota KMP yang mendapatkan pelatihan. Materi seperti pemanfaatan ekosistem secara lebih seimbang, pelatihan nelayan dalam mengembangkan kemampuan dalam menangkap ikan akan lebih bermanfaat kepada nelayan di Desa Silo Baru dalam peningkatan kapasitasnya. Dalam proses pelaksanaan pemberian pelatihan pun diharapkan tidak bentrok dengan jadwal melalui daripada peserta pelatihan, hal ini diharapkan agar pemberian materi dilakukan pada waktu sore hari atau malam sehingga para peserta menjadi lebih tenang dan lebih fokus untuk menerima bentuk pelatihan.
4. Dalam tingkat kemandirian masyarakatnya diharapkan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan dapat memiliki SOP yang jelas sebagai pedoman dalam pemilihan serta penyeleksian KMP. Sehingga dengan terjun langsungnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan akan dapat mengetahui KMP mana yang sesuai dan layak untuk melaksanakan setiap kegiatan bina melalui RKK yang diberikan. Hal ini dirasa perlu agar memberikan keadilan dari nelayan yang ingin mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan. Sehingga dalam proses penyeleksian dan pemilihan KMP yang selama ini seakan-akan di kuasai oleh Kepala Desa Silo Baru selaku Ketua Tim Pemberdayaan Desa dapat terhindarkan dengan hanya memilih masyarakat nelayan yang sesuai dengan keinginan Kepala Desa Silo Baru saja. Kemudian adanya bimbingan dalam melihat bagaimana setiap KMP berinteraksi mengenai masalah dana yang diterima, jadwal kegiatan, pembagian kerja menjadi penguatan kelembagaan nelayan yang diperlukan dalam pengembangan nelayan menjadi masyarakat nelayan yang lebih mandiri di masa yang akan datang.



REFERENSI

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan. Konsep Teori dan Implikasi Di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta CV.
- Apridar. et. all. 2011. *Ekonomi Kelautan dan Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chambers Robert. 1988, *Rular Development: Putting The Last First*. New York: British Library Cataloguing in Publication Data.
- Ghurfan, M. and K. Kordi. 2012. *Ekosistem Mangrove-Potensi Fungsi dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hikmat, H. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 136/3240. KTahun 2004 Tentang Rencana Strategis Pengelolahan Wilayah Pesisir Sumatera Utara.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Laporan Program Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013 oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Asahan.
- Laporan Penduduk Miskin Indonesia Badan Pusat Statistik Tahun (BPS) 2013.
- Mulyadi, S. 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satria A. 2001. *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Silalahi Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)No.188.4/1064/IV/2013 s/d188.4/1090/IV/2013 Tanggal 11 Juni Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) Penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengelolaan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Tahun 2013.
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- www.KPKpos.com Tanggal 13 Januari 2014.